

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR
12 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK DAN HEWAN
PENULAR RABIES DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
2012 – 2013**

RICHORAHGIA SYAHPUTRA

Email : richo_ip@ymail.com

Dosen Pembimbing : Drs. H. Muhammad Ridwan

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

Phone / Fax : +62 (0)761, 63277

Website : <http://Fisip.Unri.ac.id>

CP : 085363555003

ABSTRACT

This research based on abundant natural wealth Indonesia, one of them in an animal husbandry, including in Kuantan Singingi Regency of Riau Province. In 2012 at Kuantan Singingi Regency there were 40.208 cattles and bufallos and 16,7% of them released for and disturbed the public. Because of much the livestock roamed, then out the regulation of Regent Kuantan Singingi Number 12th 2012 years about controlling livestock and rabies transmitting animals in 2012-2013.

This research was used qualitative descriptive approach, technique of data collection is done by the informant in depth interview and documentation. The theory was used to discuss G.C. Edward III model theory.

The fact of results obtained were follows : (1) the implementations of this rule is was merely socialization. (2) Relatively minimal funding be one of reason for the implementation of this rule does not run optimally including the absence of supporting infrastructure. (3) Existence of tradition or custom issues of indigenous people around the area who collide with the rule. The conclusion of this research that the policy makers were less prepared for facilitating policies are made.

Keywords: Policy Implementation, Government, animal Husbandry

A. Pendahuluan

Keberadaan sumber daya alam yang melimpah tidak lantas menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara kaya. Dari berbagai sumber daya alam yang ada peternakan merupakan salah satu

yang menjadi fokus pemerintah. Isu-isu hangat tentang hasil peternakan seperti mahalnya harga daging dan terkait dengan kasus import daging sering menjadi pemberitaan utama baik dimedia lokal maupun nasional.

Kemudian dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah salah satunya adalah mengelola kekayaan daerah. Keberadaan hewan ternak merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dikelola oleh daerah, mulai dari keberadaan, kesehatan serta perkembangbiakannya harus diperhatikan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Oleh banyaknya hewan ternak dan hewan penular rabies di Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak dikandangkan tidak dipelihara atau tidak digembalakan sesuai ketentuan teknis yang berlaku sehingga dapat menularkan penyakit rabies kepada manusia dan ternak serta mengganggu fasilitas umum, lingkungan, keamanan, maupun keselamatan lalu lintas di jalan raya. Untuk itu Kabupaten Kuantan Singingi sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan, kemudian di atur secara teknis dan spesifik oleh Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak dan Hewan Penular Rabies.

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak dan Hewan Penular Rabies bertujuan agar salah satu asset daerah ini dapat terpelihara dengan baik, keberadaannya dapat ditata dengan rapi, kesehatan hewan dapat dengan mudah dipantau dan kesediaan pakan ternak yang memadai. Dengan demikian perkembangan hewan-

hewan tersebut akan menjadi lebih baik dan para pemilik hewan maupun peternak akan mendapat keuntungan yang lebih dan tentunya akan membawa kemajuan bagi kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri.

Fakta dilapangan menunjukkan pada tahun 2012 ada 6.704 ekor sapi dan kerbau berkeliaran bebas tanpa dibuatkan kandang oleh pemiliknya. Hal tersebut juga didukung oleh adanya tradisi masyarakat yang memelihara ternak dengan diliarikan saja. Sehingga penelitian ini akan memfokuskan pada penertiban ternaknya. Sedangkan hewan penular rabies yang ada akan langsung dimusnahkan oleh dinas terkait.

Dari uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa pada kenyataannya Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2012 tentang penertiban ternak dan hewan penular rabies belum terlaksana dengan baik dimana masih terdapat fenomena dan gejala sebagai berikut:

1. Masih adanya pemilik ternak yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sesuai dengan apa yang ditetapkan pada Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2012 tentang penertiban ternak dan hewan penular rabies.
2. Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan terhadap ternak yang ada.
3. Belum diberlakukannya sanksi tegas terhadap pemilik ternak yang tidak menjalankan Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2012 tentang penertiban ternak dan hewan penular rabies.

4. Adanya kebiasaan masyarakat setempat yang memelihara ternak dengan cara dilepaskan atau dilepas tanpa ada kandang.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK DAN HEWAN PENULAR RABIES PADA TAHUN 2012-2013.**

B. Rumusan masalah

Dengan melihat beberapa fenomena diatas maka akan menimbulkan pertanyaan yang bisa mendapat perhatian untuk diadakannya penelitian yaitu **Mengapa implementasi Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2012 tentang penertiban ternak dan hewan penular rabies pada tahun 2012-2013 belum terlaksana dengan baik?**

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab implementasi Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2012 tentang penertiban hewan ternak dan hewan penular rabies belum dapat terlaksana dengan baik.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah :

1. Sebagai bahan bagi pihak dinas peternakan dalam mengawasi pelaksanaan implementasi peraturan bupati nomor 12

tahun 2012 tentang penertiban hewan ternak dan hewan penular rabies.

2. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan.

3. Karya ilmiah ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama tentang kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, serta organisasi dan manajemen pemerintahan.

D. KERANGKA TEORITIS

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Edward III. Menurut Edward III (dalam Effendy, 2009:86) implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun juga berbentuk intruksi-intruksi dari lembaga eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Hal ini berkaitan dengan penelitian ini yaitu implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies.

Kemudian berkaitan dengan penelitian ini juga menurut Edward III (dalam Effendy, 2009;86-89) untuk mengukur pengaruh Implementasi Kebijakan Publik dapat digunakan empat (4) Variabel, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi dan (4) Struktur birokrasi.

E. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan jadikannya Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lokasi penelitian ini adalah karena Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten yang sedang berkembang dan dengan pendapatan APBD terkecil dari daerah lainnya, sehingga Pemda Kuantan Singingi harus memaksimalkan seluruh kekayaan daerah yang ada dan salah satu kekayaan tersebut adalah hewan-hewan ternak. Selain itu selama ini dikabupaten Kuantan Singingi banyak hewan-hewan yang berkeliaran di jalan raya dan secara tidak langsung hal tersebut dapat mengganggu kelancaran transportasi dan para pengguna jalan.

b. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara *purposive sampling* yaitu pengambilan informan disesuaikan dengan tujuan penelitian (H. Hadari Nawawi, 2007:167). Dipilihnya cara ini agar informan yang dipilih adalah yang dianggap penting dan benar-benar memahami tentang penyebab pelaksanaan penertiban hewan di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik. Adapun yang tepat dijadikan Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Peternakan Kab. Kuantan Singingi
2. Ka Bagian Produksi dan Pengembangan Dinas Peternakan

3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan
4. Ka Bagian Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kuantan Singingi
5. Ketua Komisi B DPRD Kab. Kuantan Singingi
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
7. Camat Singingi
8. Datuk Bagindo Simajo (tokoh masyarakat)
9. Ketua Kelompok Tani Ternak

c. Jenis Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dilapangan ,melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan daftar pertanyaan yang meliputi permasalahan yang ada dilapangan.

2. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan peneliti untuk menjelaskan permasalahan untuk yang diteliti. Adapun data sekunder berupa undang-undang, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal, laporan-laporan penelitian yang ada serta sumber-sumber lain yang terkait penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Cara atau teknik yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dilakukan dengan cara :

1. Wawancara,wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara terpimpin, yaitu pertanyaan yang telah diatur

urutannya sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat pada masalah yang hendak diungkapkan.

2. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pencatatan atau pengambilan dokumentasi seperti arsip atau bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder serta bahan-bahan lain yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran secara umum dari penelitian yang menghasilkan data mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari variabel yang diteliti dan disajikan dengan uraian dan penjelasan berdasarkan data hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2013.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang

jas. Untuk membantu penulis dalam melihat implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut bisa dilihat dari 4 (empat) variabel seperti yang diungkapkan Edward III (dalam Effendy, 2009;86-89) yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi dan (4) Struktur birokrasi dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

1. Komunikasi

Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies merupakan peraturan sekaligus himbauan dari Bupati Kuansing guna mengatur keberadaan hewan ternak dan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh hewan-hewan penular rabies.

Dalam melakukan komunikasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, tranmisi (proses penyampaian informasi), kejelasan informasi, dan konsistensi dan subtansi kebijakan.

a. Tranmisi (Proses Penyampaian Informasi)

Dalam melakukan penyampaian informasi Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies ini Dinas Peternakan telah melakukan sosialisasi kelapangan. Dalam melakukan sosialisasi Dinas Peternakan melalui pihak Kecamatan mengundang Kepala Desa – Kepala Desa, Kapolsek, Danramil, tokoh masyarakat dan ketua-ketua kelompok tani ternak.

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi merupakan unsur penting dalam berkomunikasi. Kejelasan informasi harus disampaikan dengan secara jelas dan gamblang atau mudah dimengerti.

Salah satu hasil wawancara dengan ketua kelompok tani ternak Saman Hudi menggambarkan bahwa sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan namun tindak lanjut dari sosialisasi tersebut yang masih kurang, kondisi dilapangan juga tidak ada penggunaan media dalam penyampaian informasi seperti spanduk-spanduk atau papan informasi yang sewaktu-sewaktu dapat dilihat oleh masyarakat sehingga informasi tersebut tidak menjadi simpang siur.

Komunikasi ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada kelompok sasaran (target group) artinya harus ada pesan yang diterima kelompok sasaran dalam hal ini kelompok tani ternak, apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan harus sudah jelas dan dapat dipahami oleh kelompok sasaran.

c. Konsistensi dan substansi kebijakan

Supaya pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat berjalan dengan baik perlu sosialisasi yang baik secara konsisten, terus-menerus dan merata terhadap substansi kebijakan terutama kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat secara luas. Kemudian dalam pelaksanaannya petugas-petugas di lapangan juga melakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada publik. Proses sosialisasi dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif dan edukatif karena bukan tidak

mungkin akan terjadi permasalahan dilapangan.

2. Sumber Daya

Peraturan Bupati ini seyogyanya berjalan dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan tenaga ahli yang paham betul dan menguasai permasalahan tersebut. Keberadaan sumber daya manusia atau tenaga ahli yang memiliki skill dan potensi dalam melaksanakan peraturan penting karena walaupun peraturan ini telah dikomunikasikan dengan baik namun kompetensi implementatornya tidak memadai maka peraturan tersebut tidak akan berjalan efektif.

Sumber daya itu sendiri dapat dibagi 2 (dua) yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Peternakan sebagai penerima mandat dari peraturan ini memiliki pegawai yang ahli dibidangnya dan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dari data yang di dapat mengatakan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Peternakan memiliki tenaga ahli/staf yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa mayoritas dari pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi adalah lulusan perguruan tinggi strata satu.

b. Sumber Daya Finansial (Keuangan)

Tidak seperti sumber daya manusianya, sumber dana atau sumber daya finansial untuk

melaksanakan kebijakan ini relatif minim atau kurang memadai. Minimnya alokasi dana untuk pelaksanaan peraturan ini juga menjadi alasan terkendalanya pelaksanaan peraturan tersebut. Akibat dari kurangnya anggaran dapat mengakibatkan pelaksanaan suatu program menjadi tersendat. Tidak hanya itu, kurangnya anggaran juga dapat menyebabkan program tersebut *mandek* atau terhenti.

Sumber Daya Finansial yang tidak memadai memang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Untuk mengantisipasinya diperlukan data yang akurat mengenai hal-hal mendesak yang dibutuhkan. Data tersebut digunakan untuk penggunaan anggaran sehingga dalam menggunakan anggaran tadi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak atau karakter yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan atau implementasi, seperti transparansi dan sifat demokrasi. Apabila implementasi memiliki karakteristik yang baik maka akan menjalankan dengan baik pula dan begitu pula sebaliknya. Disposisi dapat dilihat dari hal berikut ini:

1. Kebijakan dibuat setelah terdapat kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.
2. Antara pembuat kebijakan terdapat hubungan yang saling mendukung.

Dukungan dari pembuat kebijakan dalam pelaksanaan sangat

penting, termasuk dukungan anggaran namun fakta dilapangan berkata lain, dukungan yang diberikan belum maksimal salah satunya adalah dari segi penganggaran.

Namun untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini nyatanya belum terlaksana sebagaimana aturan tersebut ditertibkan, salah satunya adalah hal razia dan pemberian denda kepada yang melanggar. Sikap itu juga ditunjukkan kepada Kecamatan Singingi-Singingi Hilir untuk tidak melaksanakan razia maupun denda dengan alasan budaya masyarakat setempat serta sarana dan prasarana.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara kebijakan. Fungsi dari struktur birokrasi adalah mengatur agar tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam melaksanakan kebijakan. Diperlukan pengaturan yang baik (*good governance*) dengan melibatkan individu dalam setiap tingkatan pemerintah yang merupakan bagian dari *civil society*. *Good governance* didefinisikan sebagai sebuah acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik.

Kemudian dalam struktur birokrasi diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai landasan pelaksanaan kebijakan. SOP juga berfungsi agar petugas dilapangan tidak melakukan kekeliruan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 tahun 2012 tentang Penertiban Ternak Dan

Hewan Penular Rabies telah dijelaskan didalamnya mengenai kewajiban dan larangan bagi pemilik ternak dan hewan penular rabies (Bab III, pasal 4 – pasal 10), kewajiban dan larangan petugas (Bab IV, pasal 11 – pasal 13), lama penampungan ternak dan pengambilan ternak tangkapan (Bab V - VI, pasal 14 – pasal 16), dan sanksi (pasal 17).

Dapat dikatakan bahwa standar operasional prosedur dari pelaksanaan peraturan ini sudah diatur sedemikian rupa yang semuanya terdapat pada Peraturan Bupati tersebut, mulai dari kewajiban dan larangan bagi pemilik ternak dan petugas berisi tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan baik bagi pemilik ternak maupun petugas. Kemudian juga diatur mengenai lama penampungan dan cara pengambilan ternak hasil penangkapan serta sanksi dan denda yang harus dibayar bagi yang melanggar peraturan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa standar operasional prosedur dari pelaksanaan peraturan ini telah lengkap.

Lengkapnya standar operasional prosedur yang terdapat dalam peraturan tersebut nyatanya tidak berbanding lurus dengan pelaksanaannya. Dinas Peternakan sejauh ini melaksanakan sosialisasi-sosialisasi tanpa mengikuti bagaimana seharusnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan tersebut. Salah satu yang tidak pernah dilakukan adalah razia atau menangkap ternak yang berkeliaran kalau pun ada hanya sebatas memberikan *shock therapy* saja kepada masyarakat, tidak benar-benar dilakukan seperti aturan yang berlaku.

B. Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan

Selain beberapa variabel diatas koordinasi dan pengawasan juga turut menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Soewarno Hadiningrat (2000:88) koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

Dalam melakukan koordinasi sudah ada tim yang dibentuk langsung oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : kpts. 166/III/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Ternak Di Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain tim koordinasi berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : kpts. 166/III/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Ternak Di Kabupaten Kuantan Singingi juga telah dibentuk tim penertiban ternak kecamatan.

Sedangkan untuk pengawasan oleh DPRD Kabupaten sendiri bisa dikatakan tidak ada. DPRD selaku lembaga Negara yang ada di daerah tentunya memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan di daerah baik Perda, APBD, maupun Peraturan Bupati.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Dalam pelaksanaan Peraturan ini pasti tidak terlepas dari faktor

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari pelaksanaan ini adalah bahwa pelaksana peraturan ini yakni tim koordinasi dan tim penertiban kecamatan telah melakukan sosialisasi keseluruhan Kecamatan dan itu dapat menggambarkan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dari tim itu sendiri. Bila tidak ada kerjasama dan koordinasi yang baik tidak mungkin hal tersebut bisa terlaksana.

2. Faktor Penghambat

Dalam hal pelaksanaan Peraturan Bupati ini ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal.

Dari faktor internal yang menjadi penghambat adalah sumber daya finansial atau anggaran yang relatif minim kemudian yang menjadi faktor penghambat selanjutnya adalah tidak adanya sarana dan prasarana pendukung.

Sedangkan dari faktor eksternalnya adalah faktor penghambat yang bersumber dari masyarakat itu sendiri seperti adanya kebiasaan masyarakat yang beternak dengan melepaskan ternaknya tanpa dibuatkan kandang.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan variabel penelitian maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi. Komunikasi yang dilakukan sebatas sosialisasi-sosialisasi saja sejak peraturan ini ditertibkan hingga saat ini.
2. Sumber daya, Ketersediaan anggaran yang relatif minim menjadi salah satu alasan dari Dinas Peternakan tidak dapat melaksanakan dengan maksimal, Sehingga kegiatan yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi-sosialisasi. Kemudian sarana dan prasarana sebagai pendukung dari pelaksanaan peraturan ini juga belum tersedia seperti kandang penampungan dan papan informasi atau reklame.
3. Disposisi atau sikap, disini sikap implementator dapat dikatakan lemah. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sanksi atau denda yang diberikan petugas kepada pemilik-pemilik ternak yang melanggar peraturan tersebut. selanjutnya yang menjadi penyebab peraturan ini tidak terlaksana dengan baik adalah adanya tradisi masyarakat yang memelihara ternak dengan dilepaskan tanpa dibuatkan kandang, hal tersebut yang dimaklumi oleh Dinas Peternakan sehingga tidak melaksanakan peraturan tersebut dengan maksimal.
4. Struktur birokrasi. Tim penertiban telah dibentuk namun pelaksanaannya tidak efektif dan tidak sesuai dengan prosedur atau teknis yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies tersebut.

B. Saran

Setelah dilakukan analisis hasil penelitian pada bab sebelumnya dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, sebaiknya sebelum menerbitkan suatu kebijakan dalam hal ini Peraturan Bupati perlu diperhatikan dahulu anggaran yang tersedia dan yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan atau implementasi nantinya. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi alasan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu sarana dan prasarana pendukung juga perlu diperhatikan, jika sarana dan prasarana tersebut tidak ada setidaknya dapat dibangun bersamaan dengan pelaksanaan kebijakan, bukan tidak ada sama sekali seperti saat ini. Ketegasan petugas juga dibutuhkan disini, karena bila sebuah kebijakan telah diterbitkan maka wajib hukumnya untuk melaksanakannya selama tidak ada pihak yang menggugat atau peraturan lain yang membatalkan atau mencabutnya.

Dalam menghadapi masyarakat adat sebaiknya dilakukan pendekatan-pendekatan secara adat pula. Pendekatan secara adat dapat dilakukan dengan melakukan diskusi maupun meminta saran atau tunjuk ajar dari tetua-tetua adat dalam melaksanakan suatu kebijakan yang bersinggungan dengan kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat.

2. Bagi masyarakat (khususnya pemilik ternak), hadirnya pemerintah dalam mengatur keberadaan ternak ini hendaknya di apresiasi dengan turut mensukseskan peraturan tersebut. Bila adat atau tradisi menjadi alasannya maka hal ini baiknya ditinjau kembali oleh pihak-pihak yang berwenang. Apakah benar tradisi tersebut lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak merugikan masyarakat sekitar maupun masyarakat luas pada umumnya.

Harapan kedepannya semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus lebih terukur. Terukur dari segi pembiayaan, tujuan yang akan dicapai, sarana dan prasarana dan juga terukur pada sistem sosial dan ekonomi masyarakatnya. Sehingga baik Pemerintah maupun masyarakatnya dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerindah Desa*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Effendy, Khasan, 2009. *Pengembangan Organisasi*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Grindle, Merille S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: New Jersey Princeton.

- Ibrahim, Amin, 2004. *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar maju.
- Kansil dan Cristie, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Lembaga Adat Antau Singingi, 2007. *Musyawarah Masyarakat Adat Antau singingi*. Jakarta: Robbani Press.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Bandar Maju.
- Nawawi, H. Hadari, 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*.
- Nogi, Hasel, 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia.
- _____. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia.
- _____. 2008. *Publik Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. - Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Perca.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebikan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sumasyadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutopo, Sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Syaukani dkk, 2002. *Kebijakan Publik, Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Media Pustaka.
- Tim Penulis Agriflo. 2012. *Sapi*. Jakarta: Agriflo (Penebar Swadaya Grup)
- Wahab, Abdul, Silichin, 2002. *Analisis Kebijakan: dari permulasi ke implimentasi kebijakan*. Jakarta: BumiAksara.
- Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik (teori proses dan study kasus)*. Jakarta: C A P S.

Sumber-sumber lain :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan.
5. Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 12 tahun 2012 tentang penertiban ternak dan hewan penular rabies.
6. Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : Kpts.166/III/2013 tentang pembentukan tim koordinasi penertiban ternak di Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Riau Pos
8. Skripsi : Fitra Kusuma Wijaya. *Analisis Implementasi Kebijakan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Kota Pekanbaru Tahun 2012.* 2013. Fisip Universitas Riau.
9. Skripsi : Irfan Zulyan. *Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PT. Andalas Agrolestari di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012.* 2013. Fisip Universitas Riau.